



LAPORAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025



BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi Pemerintah Daerah, Inovasi Daerah adalah Semua Bentuk Pembaharuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386 ayat (2). Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 388 ayat (7), (9), (10) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 (Pasal 22 dan 24) Tentang Inovasi Daerah.

Menegaskan Kepala daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan Kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian dengan melibatkan lembaga yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan. pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan Inovasi, yang mana Inovasi tersebut terdiri dari tiga (3) katagori sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintah yang berupa inovasi dalam Tata Laksana Internal, fungsi Manajemen Pemerintah Daerah;
2. Pelayanan Publik yang berupa Inovasi dalam proses pemberian dan penyediaan Layanan Barang/Jasa Publik;
3. Inovasi dalam bentuk lainnya ialah Inovasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan telah menghimpun Inovasi Daerah yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan yang terangkum dalam Laporan Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesaranya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi Pendataan dan Pelaporan Inovasi Daerah yang dilakukan dilakukan Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Tembilahan, 06 November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	1
DAFTAR ISI	2
PROFIL INDEKS INOVASI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	3
GAMBARAN UMUM INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024	20
INOVASI BUNDA JENTIK UPT PUSKESMAS KUALA ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	24
INOVASI DAMKAR SIAP EMAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	27
INOVASI ASA KELUARGA (AYO SELAMATKAN ARSIP KELUARGA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ...	30
INOVASI PEJABAT E-LITE (PERPUSTAKAAN JENDELA TERHEBAT EDUKASI LITERASI) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	33
SISTEM PENGAWASAN AUDIT PENDAHULUAN (SIPADU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	36
INOVASI SAJADAH (SATU JALUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARI AWAL HINGGA AKHIR HAYAT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	38
INOVASI TUBEL TRACKER MANUAL SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 ...	40
INOVASI DAERAH “ LAUK KAKAP “ (Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap) PRODUK INOVASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	42
INOVASI SIDARA INHIL SISTEM INOVASI DAN RISET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	45
INOVASI SILAPIS WALUH (SISTEM LAPORAN INFORMASI WADAH PENYULUH) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	48
LIGAT DINSOS (LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN TERPADU DINAS SOSIAL) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	50



KEMENTRIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Pemerintah Daerah: Kabupaten Indragiri Hilir



LAPORAN INDEKS DAERAH

1. PROFIL PEMERINTAH DAERAH

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Visi dan Misi	Visi: “INDRAGIRI HILIR HEBAT DAN GEMILANG DENGAN PERTANIAN TERPADU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” Misi: Misi 1 : Mewujudkan peningkatan ekonomi Indragiri Hilir yang merata, inklusif, dan berkelanjutan Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas publik secara merata, ramah lingkungan, berkelanjutan dan Berketahanan bencana Misi 3 : Mewujudkan Sumber daya manusia yang berdaya saing, beriman, dan berakhlak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan	RANWAL RPJMD KAB. INHIL
2.	APBD tepat waktu dan pengalokasian mandatory spending		

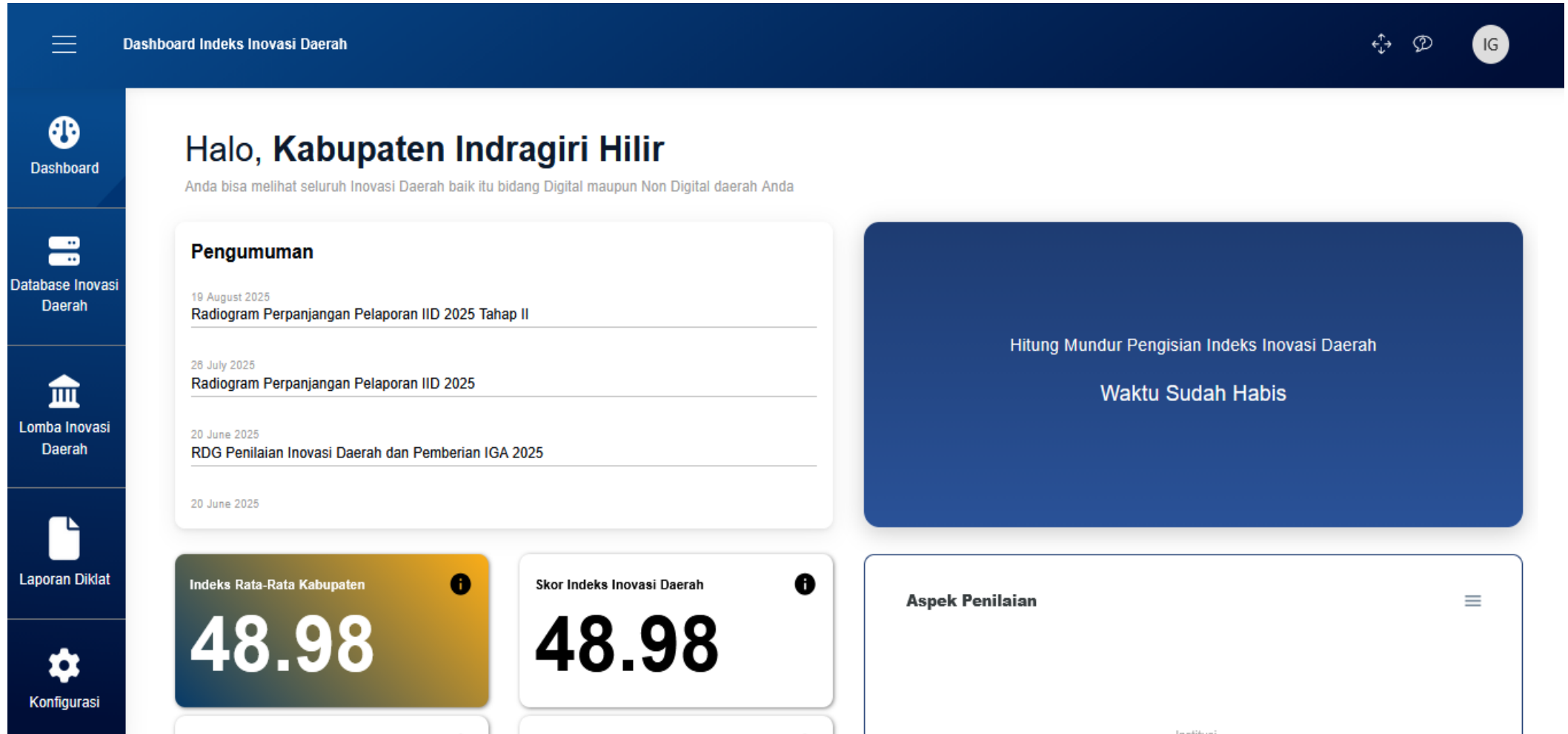
	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023, ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
	Pengalokasian Mandatory Spending pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan, dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH), belanja infrastruktur (40% DTU) dan belanja pegawai (30%)	Sudah memenuhi lebih dari 3 komponen Mandatory spending	MANDATORY, MANDATORY PEMDA INHIL
3.	Kualitas Peningkatan Perizinan	-41.127%	PENINGKATAN PERIZINAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
4.	Jumlah Pendapatan Perkapita	-2.208%	PDRB INHIL
5.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Penurunan persentase tingkat pengangguran Terbuka pada suatu Daerah	41400	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah	5970 %	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
6.	Jumlah Peningkatan Investasi	6.793%	DATA INVESTASI INHIL
7.	Jumlah Peningkatan PAD	15.413%	PAD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
8.	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ <i>unqualified Opinion</i>)	OPINI BPK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
9.	Nilai Capaian Lakip	Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran B Tahun terakhir	LHE AKIP 2023, LHE AKIP 2024
10.	Penurunan Angka Kemiskinan		
	Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin	-200	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

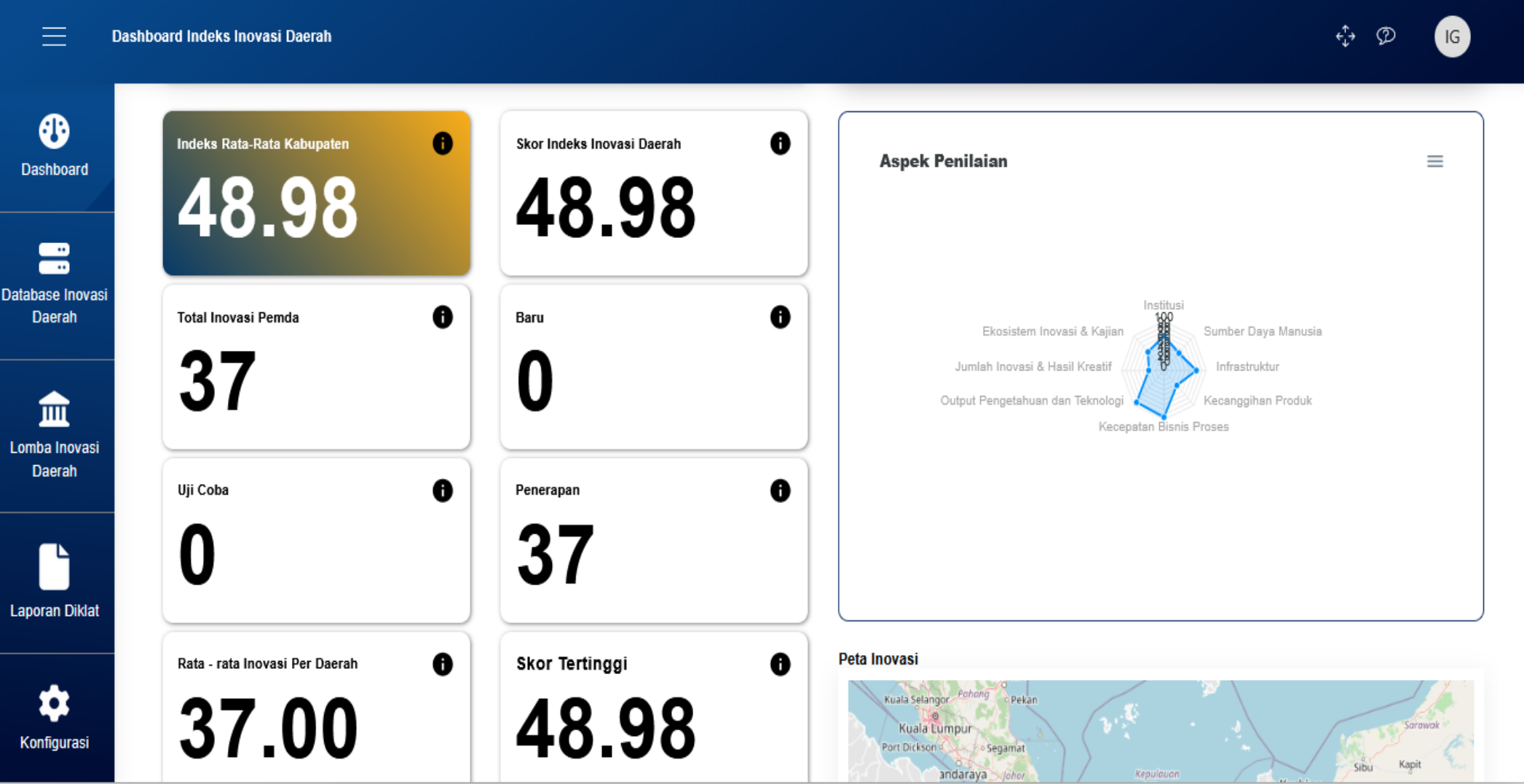
	dari BPS $-(T-1 \text{ dikurangi } T-2))$ atau T-2 dikurangi T1)		
	Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)	566 %	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
11.	Nilai IPM	4300	IPM
12.	Penghargaan Bagi Inovator	Pemberian Piagam Penghargaan, insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah dan memiliki mekanisme kontrol pembudayaan inovasi (perjanjian kinerja, skema insentif/disinsentif, kewajiban satu instansi satu inovasi, dll)	LAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INOVATOR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024, PEMBERIAN PENGHARGAAN MEDIA MASSA, SK PENETAPAN OPD TERINOVATIVE DAN INISIATOR INOVASI
13.	Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi	diatas 7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	Analisis Inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir (Nasi Uduk INHIL) Andi Nurcahaya1, Pivit Septiary Chandra2, TREN PENELITIAN INNOVATIVE GOVERNMENT DAN INOVASI PEMERINTAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU: MIX METHODS BIBLIOMETRIC ANALYSIS Dini Adhania, Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Pendaftaran Jaminan Kesehatan (SI PERJAKE) Pada Dinas Sosial Kabuapten Indragiri Hilir Muhammad Ridhwan Anjani1 Evi Zubaidah2, PENGARUH INOVASI PRODUK

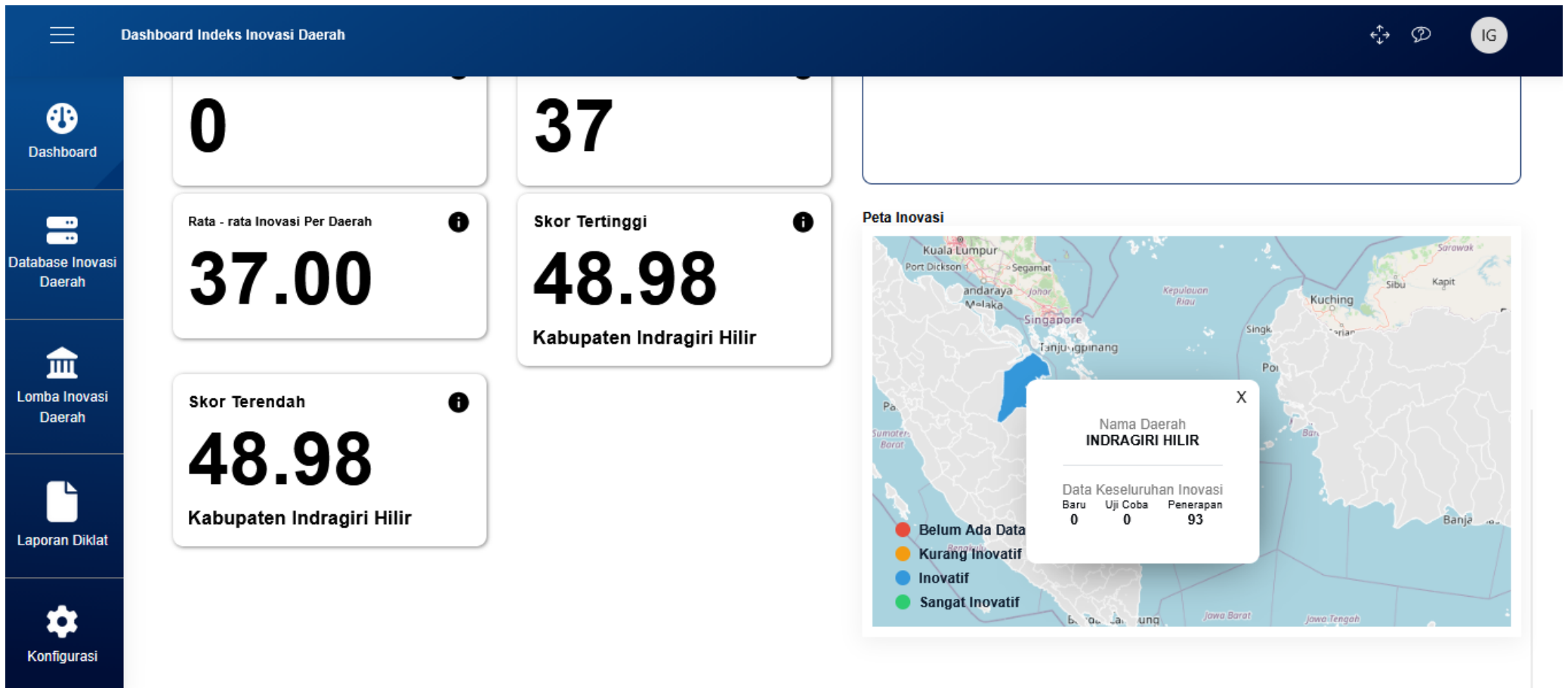
			TERHADAP PEMASARAN KOPRA PUTIH EDIBLE PADA LPK 8 YAN EKHSAN DITEMBILAHAN,SOSIALISASI INOVASI PELAYANAN NASI UDUK INHIL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MELALUI INOVASI SISTEM NASI UDUK INHIL Eko Saputra,Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kehidupan Sosial Dan Budaya Kabupaten Indragiri Hilir Nia Ramadani,MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
--	--	--	--

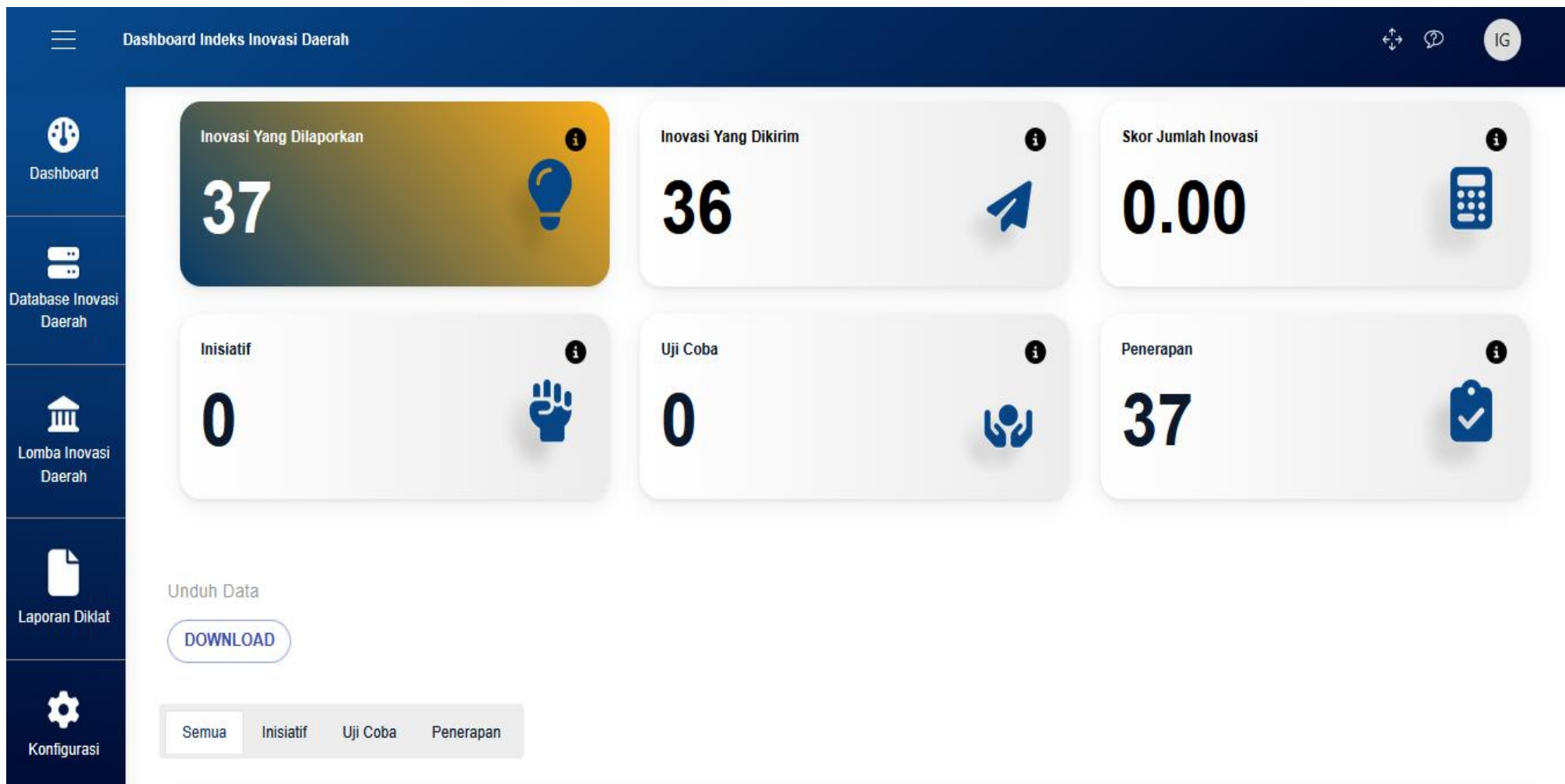
14.	Roadmap SIDA atau RIPJ PID	Masih berbentuk dokumen SIDA atau Rancangan Dokumen RIPJ PID	SK PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INOVASI DAERAH KAB. INHIL TAHUN 2025
15.	Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi HAKI atas Inovasi Daerah	Tidak Tersedia

GAMBARAN UMUM INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025









INOVASI BUNDA JENTIK

UPT PUSKESMAS KUALA ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube : <https://youtube.com/watch?v=SzSBYbKs9ss>

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah utama di kalangan masyarakat Indonesia dengan jumlah penderita yang cenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas. Terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization (WHO) mencatat Negara Indonesia sebagai Negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara (Kementrian Kesehatan RI, 2010 dalam Buletin Jendela Epidemiologi). Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus, genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. (Profil Kesehatan Indonesia, 2015). Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya nyamuk DBD (Demam Berdarah Dengue) :

Faktor Lingkungan:

1. Curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan air di berbagai tempat, sehingga menjadi tempat bagi nyamuk berkembang biak.
2. Lingkungan yang tidak bersih dan adanya genangan air di tempat-tempat seperti ember, jerigen air, kolam, atau wadah lainnya.

- Perubahan Iklim:
 1. Perubahan suhu dan curah hujan dapat mempengaruhi populasi nyamuk.
 2. Cuaca yang lebih hangat dan lembab dapat meningkatkan reproduksi nyamuk dan memperpanjang musim penyebaran penyakit.
- Mobilitas Manusia:
 1. Peningkatan mobilitas penduduk dapat menyebarkan virus dengue ke daerah baru.
 2. Orang yang terinfeksi dapat membawa virus dengue ke tempat lain dan mempercepat penyebaran penyakit.
- Kebiasaan yang Tidak Higienis:

Membuang sampah sembarangan dan tidak membersihkan lingkungan dapat menciptakan tempat ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak.
- Siklus Musiman:

DBD sering kali terjadi dengan pola musiman, terutama saat musim hujan ketika jumlah genangan air meningkat.
- Faktor Individu:

Pernah menderita demam berdarah sebelumnya dapat meningkatkan risiko terkena DBD lagi.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran DBD, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras genangan air, dan menggunakan obat nyamuk. Data dari Kementerian Kesehatan RI Kasus DBD di Indonesia tahun 2014 ada 100.347 kasus dengan kematian 907 orang, Di Provinsi Riau ada sebanyak 2.102 kasus dengan 14 orang meninggal dunia. Menurut laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 kasus DBD sebanyak 167 orang Sedangkan data dari Puskesmas Kuala Enok bisa sendiri ada 25 kasus tahun 2013 dan 27 kasus tahun 2014 dengan kematian 3 orang (Suspek DBD).

Berdasarkan masalah diatas UPT Puskesmas Kuala Enok melakukan identifikasi dan analisis masalah sebagai mana yang tergambar dalam diagram Fish Bone masalah DBD serta pemecahan masalah dengan berupaya mencari solusi dalam penanggulangan DBD tersebut dengan melakukan koordinasi bersama sector terkait sehingga terbentuklah suatu inovasi yaitu “BUNDA JENTIK”, yang merupakan suatu Upaya Kesehatan yang Besumberdayakan Masyarakat (UKBM) dalam penanggulangan Penyakit Demam berdarah yang beranggotakan ibu ibu dengan keluarga yang anggota keluarganya pernah menderita penyakit demam berdarah di Kelurahan Kuala Enok.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-143348-2024

INOVASI DAMKAR SIAP EMAS

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube: <https://youtu.be/-Y4TQAJcukk?si=1n33cvcGv4QFicZ->

Salah satu jenis pelayanan publik yang sangat esensial di setiap daerah ialah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pelayanan untuk menangani kebakaran dan penyelamatan lainnya dapat diupayakan melalui aplikasi android, sehingga pelaporan laporan dapat diterima, dicatat, dan ditangani secara tepat dengan sistem berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi android dari yang sebelumnya untuk terus di update dan di sempurnakan. dengan layanan berbasis lokasi untuk pelaporan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang efektif, serta menguji efektivitas aplikasi android dengan layanan berbasis lokasi untuk pelaporan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode dalam penelitian ini mengimplementasikan layanan berbasis lokasi dan firebase.

Aplikasi android DAMKAR SIAP EMAS dilengkapi fitur pelaporan disertai dengan lokasi akurat berdasarkan layanan berbasis lokasi dan dapat menyertakan foto kejadian. Selain itu, aplikasi DAMKAR SIAP EMAS dilengkapi dengan fitur chats yang memudahkan masyarakat dan petugas untuk saling berkomunikasi dengan bertukar pesan. Efektivitas aplikasi DAMKAR SIAP EMAS Implementasi layanan berbasis lokasi menggunakan akses GPS pada perangkat, Memahami akan tugas

dan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan menjadi kewajiban yang tidak terelakkan bagi seorang patriot kemanusiaan siapapun dia, dimanapun dia berada, sudah bisa dipastikan segala sesuatu akan ditinggalkan begitu saja baginya meskipun harus meninggalkan keluarga yang dicintainya dan nyawa dipertaruhkan demi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada aplikasi DAMKAR SIAP EMS menambahkan fitur Layanan Medis EMS, kegunaan fitur ini untuk masyarakat dan internal petugas Damkar. Fitur EMS dalam aplikasi Damkar memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu untuk pelayanan masyarakat dan perlindungan petugas Damkar itu sendiri. Untuk masyarakat, fitur ini berfungsi sebagai sarana pelaporan kondisi medis darurat secara cepat dan tepat. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi untuk melaporkan kejadian seperti kecelakaan, serangan jantung, pingsan, luka serius, atau situasi medis lainnya. pelapor akan langsung terkirim ke tim EMS Damkar sehingga mempersingkat waktu respon.

Selain pelaporan, fitur ini juga bisa menyediakan edukasi seputar pertolongan pertama, tindakan darurat, dan panduan menghadapi situasi medis sebelum bantuan datang. Sementara itu, untuk keperluan internal, EMS sangat bermanfaat dalam mendukung keselamatan dan kesehatan petugas Damkar di lapangan. Saat terjadi kebakaran atau insiden non-kebakaran, risiko cedera pada petugas sangat tinggi, baik karena asap, panas ekstrem, kelelahan, atau kecelakaan kerja lainnya. Dengan adanya fitur EMS, jika ada petugas yang terluka, mereka dapat langsung meminta bantuan melalui aplikasi dengan satu tombol darurat yang mengirimkan lokasi dan kondisi mereka ke tim medis internal atau posko. Selain itu, fitur ini dapat menyimpan data kesehatan dasar setiap petugas sehingga memudahkan penanganan di lapangan dan saat dirujuk ke fasilitas kesehatan.

Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk memantau dan mencatat seluruh kejadian medis yang dialami petugas sebagai bagian dari laporan keselamatan kerja serta untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan ke depan. Dengan kata lain, fitur EMS dalam aplikasi Damkar bukan hanya membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, tetapi juga menjadi sistem perlindungan bagi para petugas Damkar yang setiap harinya menghadapi risiko tinggi di lapangan. Aplikasi ini akan terus

berkembang sesuai dengan kebutuhan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-150323-2023

INOVASI ASA KELUARGA (AYO SELAMATKAN ARSIP KELUARGA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link youtube: <https://youtu.be/JojrWXFTR2s?si=nPrvgONLECufglyr>

Kearsipan adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumendokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan dokumendokumen tersebut dapat ditemukan secara cepat. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah program yang bertujuan untuk melestarikan dan mengelola arsip keluarga masyarakat secara digital dengan mengembangkan platform digital untuk mengunggah, mengorganisir, dan menyimpan arsip keluarga masyarakat secara baik dan benar dan, Melalui Inovasi : “ASA Keluarga” (Ayo Selamatkan Arsip Keluarga) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyediakan sarana informasi manajemen kearsipan yang akan menambah pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat secara mandiri bisa melakukan penyelamatan Arsip Keluarga dengan baik.

Adapun Tujuan Inovasi “ASA Keluarga” (Ayo Selamatkan Arsip Keluarga) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :

1. Memberikan pengetahuan tentang Penyelamatkan Arsip Keluarga kepada masyarakat;
2. Untuk membantu masyarakat melestarikan dan mengelola arsip keluarga mereka secara digital;

3. Meningkatkan pemahaman kaidah kearsipan melalui praktek manajemen arsip;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan mencerdaskan Masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir

dan Manfaatnya Inovasi “ASA Keluarga” (Ayo Selamatkan Arsip Keluarga) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir antar lain :

1. Membantu masyarakat melestarikan warisan keluarga mereka secara digital dan aman;
2. Arsip keluarga dapat disimpan secara digital, sehingga menghemat ruang fisik.;
3. Masyarakat dapat mengakses arsip keluarga mereka dari mana saja dan kapan saja.

Ayo Selamatkan Arsip Keluarga!

Arsip keluarga adalah warisan berharga yang menyimpan kenangan, sejarah, dan identitas keluarga. Namun, seringkali arsip keluarga terlupakan atau rusak karena faktor waktu, bencana, atau kurangnya perawatan.

Mari kita selamatkan arsip keluarga kita!

Dengan melestarikan arsip keluarga, kita dapat:

- Mengabadikan kenangan dan sejarah keluarga
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya Warisan budaya
- Mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap keluarga.

Cara melestarikan arsip keluarga:

- Foto dan dokumen dapat disimpan secara digital
- Arsip dapat diorganisir dan dikategorikan
- Arsip dapat disimpan dalam tempat yang aman dan terlindungi

Ayo, selamatkan arsip keluarga kita!

Dengan melestarikan arsip keluarga, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya dan sejarah keluarga kita tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Mari kita bekerja sama untuk melestarikan arsip keluarga kita!



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-164054-2024

INOVASI PEJABAT E-LITE (PERPUSTAKAAN JENDELA TERHEBAT EDUKASI LITERASI) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB INHIL



Link Youtube: <https://youtu.be/Epa6nmVAoIU?si=MWylYTzfW0SI5w-t>

Perpustakaan Daerah berperan sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi dengan tujuan meningkatkan kecerdasan serta pemberdayaan bangsa. Pelayanan perpustakaan didasarkan pada prinsip pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesionalisme, keterbukaan, terukur, dan kemitraan. Lembaga ini berfokus pada penyediaan layanan bagi pemustaka, menumbuhkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan berbagai layanan, antara lain layanan anak, layanan umum, referensi, perpustakaan keliling, keanggotaan, serta pelayanan inklusi sosial melalui Museum Kelapa. Sebagai pusat informasi, perpustakaan ini menyediakan koleksi buku cetak dan e-book digital, serta memfasilitasi beragam kegiatan seperti pembelajaran, seminar, diskusi, kuliah umum, pelatihan, dan wisata edukasi literasi bagi pemustaka dan masyarakat. Dengan membaca, para pengguna dapat menerapkan ilmu dari buku untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi.

Teknologi informasi juga dioptimalkan untuk meningkatkan layanan dan menjembatani pemustaka dengan sumber belajar yang selalu mutakhir. Selain itu, pemustaka dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui program inklusi sosial

seperti pengolahan minyak kelapa (VCO), budidaya madu lebah, pemanfaatan tempurung dan sabut kelapa, membuat ecoprint, dan inovasi lainnya. Buku dan fasilitas di perpustakaan daerah berperan krusial dalam penyebaran informasi. Data dari berbagai literatur selanjutnya dapat dikembangkan di perpustakaan sekolah, desa, masjid/mushola, perusahaan, taman baca masyarakat, maupun rumah baca. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kepastakaan dan kearsipan. Sebagai inovasi, pada lantai dasar gedung disediakan Perpustakaan Anak, sedangkan lantai II diperuntukkan Pelayanan Umum, dan lantai IV menampung Museum Kelapa. Langkah ini diharapkan mendorong minat baca pelajar dan masyarakat, baik mereka yang tertarik menelusuri sejarah perkelapaan melalui museum, maupun yang memerlukan bacaan untuk tugas sekolah, kuliah, atau pengetahuan umum. Permasalahan rendahnya minat baca pelajar dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir akhirnya direspons dengan sebuah terobosan inovatif, yaitu PEJABAT ELITE, singkatan dari Perpustakaan Jendela Terhebat Edukasi Literasi. Model baru ini dirancang khusus untuk meningkatkan akses, kenyamanan, dan daya tarik layanan perpustakaan sehingga publik terdorong untuk berkunjung dan membaca lebih sering.

Melalui inovasi Perpustakaan Jendela Terhebat Edukasi Literasi (PEJABAT ELITE), sebuah pengembangan dari konsep sebelumnya bernama PEJABAT (Perpustakaan Jendela Terhebat), perpustakaan menyediakan ruang baca dan koleksi buku yang dikelola oleh petugas profesional. Dukungan teknologi mempermudah pemustaka dan masyarakat dalam berkunjung, membaca, meminjam, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas di perpustakaan dengan lebih efisien, sekaligus membantu pemecahan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan hadirnya inovasi PEJABAT ELITE (Perpustakaan Jendela Terhebat Edukasi Literasi), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berhasil meningkatkan minat baca sekaligus mewujudkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Keberhasilan ini tercapai berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Indragiri Hilir. Produk inovasi ini turut meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan sosial di wilayah tersebut.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**

Nomor Registrasi: 14.04-158698-2024

SISTEM PENGAWASAN AUDIT PENDAHULUAN (SIPADU)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube: https://youtu.be/aMF8O-xreA0?si=a623b_FqxqE-BS4z

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendukung dan memperkuat efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perwujudan Peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 11, sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 48 menjelaskan bahwa Pengawasan Intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Proses audit dibagi atas 3 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap perencanaan dilakukan melalui pelaksanaan survei pendahuluan atau audit pendahuluan yang tahapannya

terdiri atas penetapan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman auditi, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi pengendalian kunci, evaluasi pengendalian, penyusunan rencana pengendalian, penyusunan program audit dan penentuan sumber daya. Sementara itu tahap pelaksanaan audit dimulai dari pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan keputusan, dan pengembangan temuan dan rekomendasi. Tahap terakhir adalah pelaporan yang terdiri atas penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan dan monitoring tindak lanjut.

Laporan Hasil Audit (LHA) harus memenuhi syarat kualitas komunikasi yang baik, yaitu, akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu. Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka Laporan Hasil Audit harus tepat waktu, karena laporan yang terlambat disampaikan nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil audit.

Penyelesaian dan Penerbitan Laporan Hasil Audit di Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum tepat waktu. Persoalan ini jika tidak dicarikan solusinya akan memperlemah pengawasan internal di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu perlu dicarikan solusi untuk menyelesaikan masalah keterlambatan penyelesaian LHA tersebut dengan melakukan pengawasan Pelaksanaan Audit Pendahuluan melalui aplikasi sipadu (Sistem pengawasan audit pendahuluan). Dengan aplikasi SIPADU, dapat dimonitor progress pelaksanaan audit pendahuluan (Penyelesaian kertas kerja dan laporan audit pendahuluan yang merupakan syarat untuk melanjutkan ke tahap audit selanjutnya), sehingga dapat menghemat waktu pelaksanaan dan pelaporan audit terinci. Adapun laman situs web SIPADU adalah sipadu.inspektorat.inhilkab.go.id.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-159250-2024

INOVASI SAJADAH (SATU JALUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARI AWAL HINGGA AKHIR HAYAT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube: <https://youtu.be/BaAjj5QMo0Q?si=PT7dLvclxC4vDm01>

SAJADAH (Satu Jalur Administrasi Dukcapil dari Awal hingga Akhir Hayat) merupakan pengembangan dari inovasi SAMBAL TERASI (Sistem Informasi Berjalan Terintegrasi) yang sebelumnya hanya fokus pada pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir (KK, Akta Kelahiran, dan KIA), kini diperluas dengan menambahkan pelayanan penerbitan Akta Kematian. Inovasi ini melibatkan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir dengan fasilitas kesehatan mitra (rumah sakit dan puskesmas).

Inovasi ini mengintegrasikan pelayanan kelahiran dan kematian secara digital melalui faskes mitra, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil. Dengan demikian, administrasi kematian dapat diproses secara cepat, akurat, dan manusiawi tanpa membebani keluarga yang sedang mengalami duka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1): Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga, penduduk, atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

kematian. Pasal 44 Ayat (2): Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

Kematian merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam sistem administrasi kependudukan. Namun dalam praktiknya, banyak keluarga tidak segera mengurus Akta Kematian, baik karena ketidaktahuan, keterbatasan waktu, jarak, atau kondisi emosional pascakehilangan anggota keluarga. Kondisi ini menyebabkan banyak data penduduk menjadi tidak akurat, dan menimbulkan kendala dalam layanan turunannya seperti pembaruan data BPJS, klaim asuransi, waris, hingga penghapusan dari data bantuan sosial.

Kendala semakin nyata ketika keluarga harus mengurus dokumen tersebut di tengah duka, padahal proses pembuatan Akta Kematian memerlukan kelengkapan dokumen seperti surat keterangan dokter, KTP, KK, dan datang langsung ke kantor Disdukcapil. Akibatnya, banyak kematian tidak tercatat resmi di sistem.

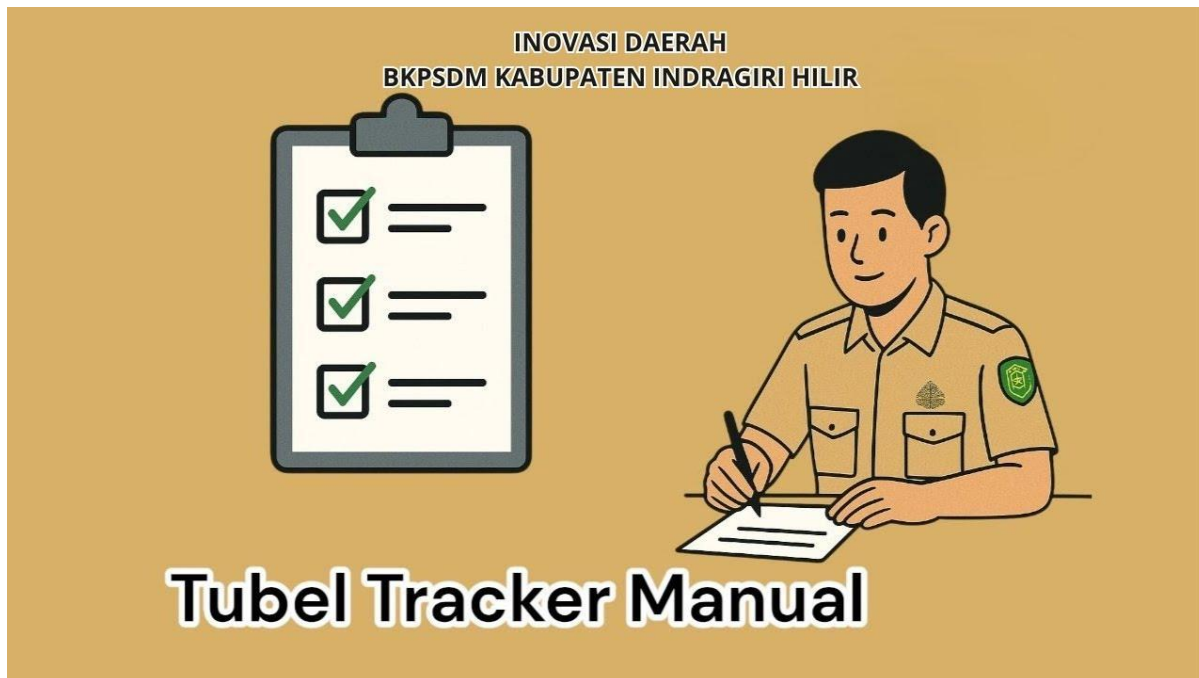
Melalui pengembangan inovasi SAJADAH (Satu Jalur Administrasi Dukcapil dari Awal hingga Akhir Hayat), pelayanan akta kematian kini dapat dilakukan langsung dari faskes tempat pasien meninggal dunia, bersamaan dengan penerbitan surat keterangan kematian oleh dokter. Data dan dokumen yang lengkap diupload melalui sistem digital ke Disdukcapil untuk diverifikasi dan diproses. Setelah itu, Akta Kematian dikirimkan kembali ke faskes untuk diteruskan kepada keluarga.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-156765-2024

INOVASI TUBEL TRACKER MANUAL SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024



Link Youtube: <https://youtu.be/UYthv3JrsqU?si=llnOGczhkOuK29eg>

BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. BKPSDM adalah bagian instansi pemerintahan daerah yang bertugas menangani urusan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan pelatihan aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya.

Adapun Fungsi BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Indragiri Hilir adalah bertugas untuk membantu Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibawah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta administrasi kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi aparatur daerah.

Pada tahun 2024 BKPSDM melakukan Inisiasi berbentuk Inovasi pada Tugas Belajar (Tubel) yang merupakan salah satu program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dipantau secara efektif agar pelaksanaannya sesuai ketentuan. Selama ini, proses pemantauan data dan perkembangan peserta Tubel masih dilakukan secara manual dan terpisah, sehingga berpotensi

menimbulkan keterlambatan informasi. sehingga Untuk itu, BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir menginisiasi penyusunan Tubel Tracker Manual sebagai inovasi tata kelola pemerintahan yang berpedoman sebagai kerja sederhana yang memudahkan pada pegawai kanupaten indragiri hilir untuk melakukan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi peserta Tubel secara sistematis dan terintegrasi.

1. Ruang Lingkup Inovasi Tubel Tracker Manual ini mencakup sebagai berikut:
 - Proses pencatatan peserta Tubel sejak awal pengajuan sampai selesai.
 - Format isian data yang baku.
 - Tata cara pelaporan berkala.
 - Mekanisme evaluasi hasil Tubel.
2. Metodologi Penyusunan Inovasi Tubel Tracker Manual
Manual disusun melalui identifikasi kebutuhan, pengumpulan format data, konsultasi dengan pengelola Tubel, serta uji coba penerapan pada sampel data peserta.
3. Output yang Diharapkan pada inovasi Tubel Tracker Manual
Dokumen Tubel Tracker Manual yang dapat digunakan oleh seluruh pengelola Tubel di BKPSDM dan instansi terkait. Tersedianya format baku pemantauan Tubel yang siap digunakan.
4. Penutup
Dengan adanya Inovasi Tubel Tracker Manual, diharapkan pengelolaan Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi lebih tertib, efisien, dan terukur, sehingga berdampak positif pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-164195-2024

INOVASI DAERAH “ LAUK KAKAP “ (Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap) PRODUK INOVASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube: <https://youtu.be/nWUPoGqzOIE?si=zzRGDaMVWy2tJtvD>

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 63 Tahun 2021 mengatur tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu bidang yang ada adalah Bidang Kenelayanan, menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terkait dengan Pengembangan Sumberdaya Nelayan Kecil, Kemitraan dan Informasi Usaha Nelayan Kecil, dan Kelembagaan Nelayan Kecil, dengan Tugas dan Fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan identitas profesi nelayan kecil
- b. Memberikan registrasi kelompok nelayan kecil
- c. Melakukan pembinaan penyuluhan perikanan
- d. Memfasilitasi penumbuh kembangan nelayan kecil
- e. Memfasilitasi penumbuh kembangan usaha kelompok perikanan
- f. Memfasilitasi pengembangan penguatan kelembagaan nelayan kecil
- g. Memfasilitasi pengembangan KUB yang berbadan hukum
- h. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama kelompok usaha perikanan
- i. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan UKM perikanan.

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan, dimana sebagian besar dari kecamatan tersebut terletak di daerah pesisir dan dilewati sungai. Di Kecamatan

tersebut merupakan komunitas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, adalah Pengembangan Sumberdaya, Kemitraan, Informasi Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan tersebut adalah memastikan nelayan-nelayan tersebut terdaftar sebagai pelaku usaha perikanan tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk mendaftarkan nelayan tersebut dalam program KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan) diperlukan kelengkapan persyaratan Administrasi seperti KTP, Kartu keluarga, armada (nama kapal, ukuran kapal, jenis dan power mesin) serta jenis alat tangkap. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan untuk memudahkan perlindungan, pemberdayaan, pelayanan dan pembinaan serta untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian dan pemerintah daerah. Jauhnya jarak antara desa-desa nelayan dengan kantor Dinas Perikanan dan terbatasnya SDM menjadi hambatan utama dalam melaksanakan Tugas dan fungsi tersebut. Jarak yang jauh antara lokasi tempat tinggal nelayan dengan Kantor Dinas Perikanan sehingga menyita waktu dan biaya, menyebabkan keengganan nelayan mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu identitas sebagai pelaku usaha perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menghimpun permasalahan dan ide-ide guna penyelesaian permasalahan pendataan dan pendaftaran program kartu KUSUKA bagi nelayan, dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kondisi lapangan menggagas inovasi daerah “LAYANAN TERPADU KARTU KUSUKA PERIKANAN TANGKAP” (LAUK KAKAP), yang menggunakan koneksi internet berbasis data yang disediakan secara gratis dari pihak Google Formulir, selain gratis sangat mudah di operasikan dan kompetibel hampir dengan seluruh smartphone saat ini. Inovasi “LAUK KAKAP” (Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap) sebagai produk inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Inovasi. Standar Operasional Prosedur ini berguna bagi masyarakat untuk menyampaikan data nelayan guna dilakukan pendaftaran pada program kartu KUSUKA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Inovasi “LAUK KAKAP” (Layanan Terpadu Kartu KUSUKA Perikanan Tangkap) ini melibatkan unsur Penyuluh Perikanan sebagai bagian penting dalam membantu masyarakat mempersiapkan dan memverifikasi data untuk mengajukan permohonan pendaftaran kartu KUSUKA secara online. Selain itu, penyuluh perikanan sangat berperan penting dalam membantu pihak Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menginput data nelayan kedalam Aplikasi KUSUKA. Dalam proses mempersiapkan kelengkapan data nelayan, juga melibatkan aparat pemerintahan Desa.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**

Nomor Registrasi: 14.04-164279-2023

INOVASI SIDARA INHIL SISTEM INOVASI DAN RISET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube: https://youtu.be/vTAtu70efXY?si=NKcFJ-uo-xJfi5_N

Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai bagian dari Provinsi Riau, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, kekayaan budaya yang beragam, serta letak geografis yang strategis. Namun demikian, seperti halnya daerah lain, Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, antara lain keterbatasan infrastruktur, ketimpangan antarwilayah, rendahnya nilai tambah pada sektor unggulan, serta persoalan sosial dan lingkungan yang kompleks.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah yang terarah, partisipatif, dan berbasis data, riset, serta inovasi menjadi kunci dalam memberikan arah pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan proses strategis yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan secara terstruktur, sistematis, dan terukur guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang efektif dan berkelanjutan memerlukan landasan yang kuat, berupa data yang akurat, analisis yang mendalam, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86

Tahun 2017, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan partisipatif. Dalam kerangka ini, riset dan inovasi daerah seharusnya menjadi salah satu sumber utama dalam setiap tahapan, baik dalam penyusunan RPJMD, RKPD, maupun dalam pelaksanaan program pembangunan.

Namun dalam praktiknya, proses perencanaan pembangunan di daerah masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan data dan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah mengembangkan sebuah inovasi strategis yang diberi nama SIDARA INHIL (Sistem Inovasi dan Riset Daerah).

SIDARA INHIL bertujuan untuk mengintegrasikan hasil-hasil riset dan inovasi ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus memperkuat tata kelola inovasi di tingkat daerah. Melalui platform ini, diharapkan terjadi sinergi antarpemangku kepentingan dalam membangun sistem perencanaan yang adaptif, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang berpijak pada potensi lokal, data ilmiah, hasil riset, serta kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan, sejalan dengan isu-isu strategis daerah dan dinamika pembangunan nasional. Wujud dari inovasi SIDARA INHIL (Sistem Inovasi dan Riset Daerah) tidak hanya terletak pada kolaborasi dalam pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga diwujudkan melalui layanan digital yang dapat diakses melalui halaman website resmi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Halaman ini memuat fitur layanan pemetaan hasil riset dan pengelolaan database inovasi daerah, sehingga memudahkan perangkat daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengakses, mengelola, serta memanfaatkan informasi riset dan inovasi secara efektif dan berkelanjutan. Adapun beberapa item dan fitur yang terdapat pada halaman SIDARA INHIL (Sistem Inovasi dan Riset Daerah) :

1. Laporan Inovasi Daerah : Berisi kumpulan dokumen resmi yang memuat rekapitulasi program dan kegiatan inovatif yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, masyarakat, atau pihak lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir yang telah di laporkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Video Inovasi Daerah : Merupakan konten audio-visual yang menampilkan dokumentasi atau menggamabrkan inovasi daerah di berbagai sektor.
3. Hasil Pemetaan Riset Daerah : Fitur ini menampilkan hasil riset/kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga litbang, perguruan tinggi, dan OPD.
4. Database Riset Daerah : Berisi data terstruktur mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Database Inovasi Daerah : Merupakan kumpulan data inovasi yang telah dikembangkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat.
6. Dashboard Statistik Inovasi Daerah : Menampilkan data dalam bentuk visual (grafik dan diagram) terkait perkembangan inovasi dan riset di Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Layanan Konsultasi Inovasi Daerah : Merupakan fitur interaktif yang memberikan ruang bagi perangkat daerah, peneliti, dan masyarakat untuk berkonsultasi seputar pengembangan inovasi. Layanan ini difasilitasi oleh Bappeda melalui system.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-158030-2024

INOVASI SILAPIS WALUH (SISTEM LAPORAN INFORMASI WADAH PENYULUH) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube: <https://youtu.be/Qg5Foe01xKo?si=rooP4EHZoQetALaw>

Kabupaten Indragiri Hilir selain dikenal dengan Negeri Seribu Parit juga dikenal dengan Negeri Hamparan Kelapa Dunia. Banyaknya parit yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir juga memberikan dampak kepada Perkebunan Masyarakat salah satunya dapat dijadikan sebagai moda transportasi angkut hasil perkebunan, namun dengan stuktur tanah yang didominasi oleh tanah gambut yang dikelilingi perairan sungai dan pasang surut air laut, tentunya hal ini perlu perhatian dan perlakuan khusus baik itu dampak dari perubahan iklim, cuaca dan usia dari lahan perkebunan itu sendiri dan ini memerlukan kerjasama antara petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas layanan kepada Kelompok Tani, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri

Hilir membuat Inovasi Sistem Laporan Informasi Wadah Penyuluh yang disingkat dengan (SILAPIS WALUH).

SILAPIS WALUH (Sistem Laporan Informasi Wadah Penyuluh), Inovasi ini merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang Secara digital bagi para penyuluh dalam mendokumentasikan, mengelola, dan mendistribusikan laporan kegiatan penyuluhan secara lebih cepat dan Efektif. Melalui integrasi data digital, SILAPIS WALUH tidak hanya mempercepat alur informasi, tetapi juga menyediakan alat analisis untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penyuluhan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Inovasi ini tujuan untuk Meningkatkan efisiensi pelaporan kegiatan penyuluhan, Menyediakan data dan informasi yang valid dan terstruktur, Mempermudah pemantauan dan analisis program secara berkelanjutan, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja penyuluh.

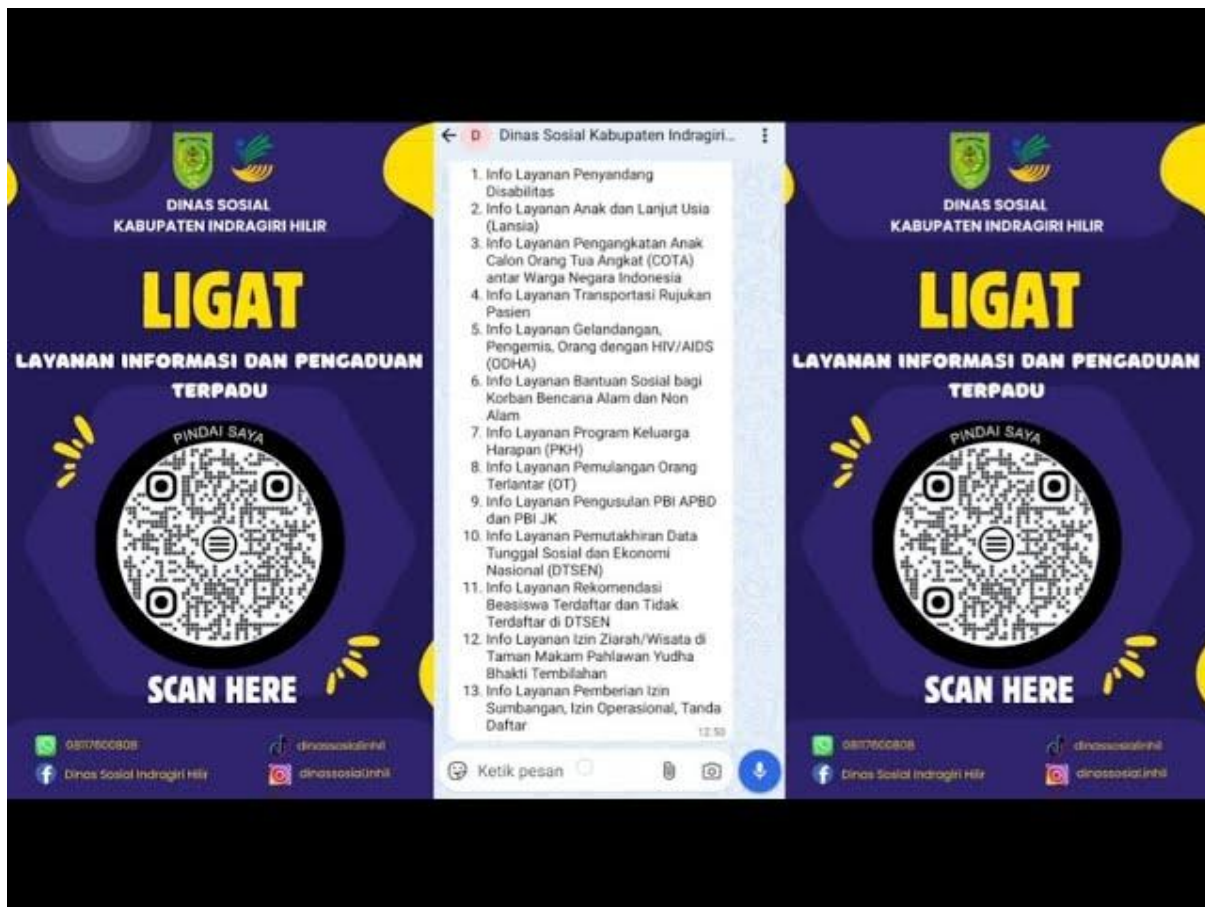
Menyikapi hal tersebut Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berinisiatif dengan menyelaraskan era digitalisasi saat ini serta mengefisiensi waktu maka dengan ini membuat suatu terobosan baru yakni meluncurkan inovasi SISTEM LAPORAN INFORMASI WADAH PENYULUH (SILAPIS WALUH). Dalam pelaksanaannya Inovasi Sistem Laporan Informasi Wadah Penyuluh (SILAPIS WALUH) masih perlu pengembangan dan masih ada kekurangan baik dari segi sarana maupun prasarana di Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang perlu dilengkapi sehingga pelayanan informasi bisa berjalan optimal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-164253-2024

LIGAT DINSOS (LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN TERPADU DINAS SOSIAL) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Link Youtube: <https://youtu.be/fTO0-onlxvc?si=dDLmjdUGE8hd9FDO>

Permasalahan sosial menjadi hal yang tidak bisa di hindarkan di era digital 5.0. Kecepatan informasi dan perubahan gaya hidup menjadikan masalah sosial makin kompleks. Mulai dari tantangan akan person masalah sosial seperti gelandangan, anak terlantar, hingga terkait data kemiskinan yang terus menjadi sorotan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi tugas utama pemangku kepentingan diantaranya Dinas Sosial selaku garda terdepan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Ada 13 Standar Pelayanan Maksimal (SPM) terkait masalah sosial yang mesti di lakukan oleh Dinas Sosial yakni :

1. Pelayanan Penyandang Disabilitas
2. Pelayanan Anak dan Lanjut Usia (Lansia)
3. Pelayanan Pengangkatan Anak Calon Orang Tua Angkat (COTA) Antar Warga Negara Indonesia

4. Pelayanan Transportasi Rujukan Pasien
5. Pelayanan Gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
6. Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam
7. Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH)
8. Standar Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar (OT)
9. Pelayanan Pengusulan PBI APBD dan PBI-JK
10. Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
11. Pelayanan Rekomendasi Basiswa Terdaftar dan tidak terdaftar DTKS
12. Pelayanan izin/wisata di Taman makam pahlawan Yudha Bhakti Tembilahan
13. Pelayanan pemberian izin sumbangan, izin operasi dan tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Standar Pelayanan Maksimal (SPM) merupakan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pelaksanaan SPM ini tentunya memiliki berbagai tantangan di berbagai daerah seperti di Indragiri Hilir yang merupakan wilayah dengan geografis yang sulit dan rentang kendali yang jauh menyebabkan akses pelayanan masyarakat yang sulit. Karena mesti mengakses dinas sosial yang terletak di kota tembilahan, sehingga dengan adanya Inovasi LIGAT DINSOS (Layanan Informasi dan Pengaduan Terpadu Dinas Sosial). Melalui Inovasi LIGAT DINSOS ini telah mampu memberikan dampak positif secara langsung kemudahan pelayanan, diantaranya:

1. Perhatian masyarakat terhadap permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi lebih terarah dan lebih mudah dalam melakukan pelaporan pada Dinas Sosial kab. Inhil.
2. PMKS yang juga bisa mendapatkan perhatian dan bantuan hidup yang lebih baik, Seperti modal usaha dan bantuan sosial.
3. Terjalinnnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan baik aparat desa, aparat Kecamatan serta OPD terlibat dalam memutus rantai kemiskinan.

Berbagai terobosan yang Inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Penerapan Inovasi LIGAT DINSOS oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri

Hilir selaku Leading Sektor bersama-sama dengan Unsur Perangkat Daerah dan Masyarakat serta Stake holder lainnya, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Penanganan PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Nomor Registrasi: 14.04-164266-2024



**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**